

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Keberhasilan kinerja suatu organisasi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan diukur melalui berbagai indikator-indikator dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan/evaluasi. Pengukuran kinerja tersebut merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan merupakan jembatan antara perencanaan strategi dan akuntabilitas. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya pembangunan merupakan unsur perencanaan yang mempengaruhi kelancaran serta pencapaian target yang akan direncanakan. Sumber daya tersebut meliputi : Modal, SDM, Teknologi, Organisasi/kelembagaan sedangkan perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar manajemen perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan.

Dalam Undang-undang ini pada ruanglingkupnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Intinya dokumen perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mencakup : Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan periode 20 (duapuluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, yang memuat :

- *Kerangka ekonomi makro termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter*
- *Prioritas pembangunan*

➤ Rencana kerja dan pendanaannya pemerintah dan partisipasi masyarakat

Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJP Daerah.

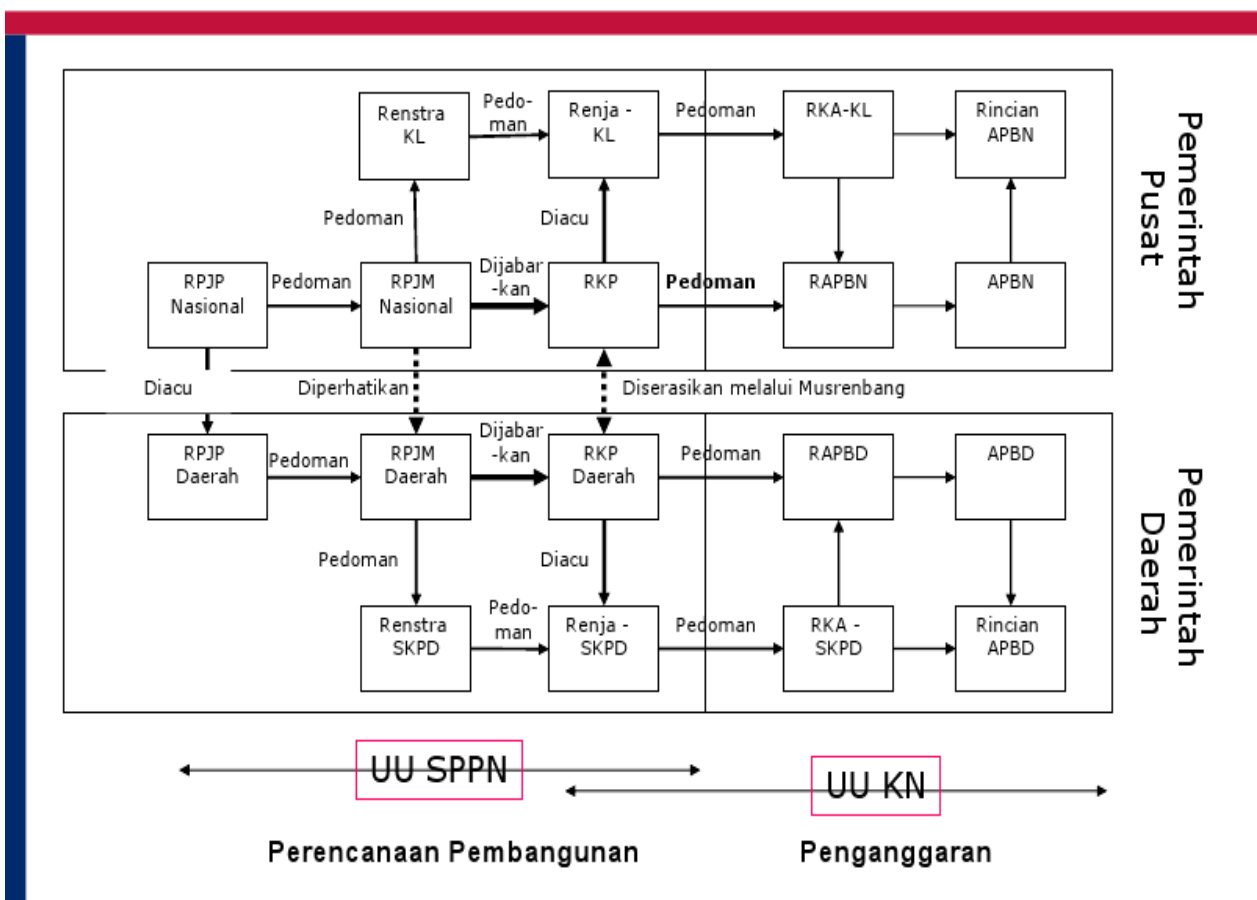
Rencana Strategis Badan/Dinas/Instansi yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Badan/Dinas/Instansi untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

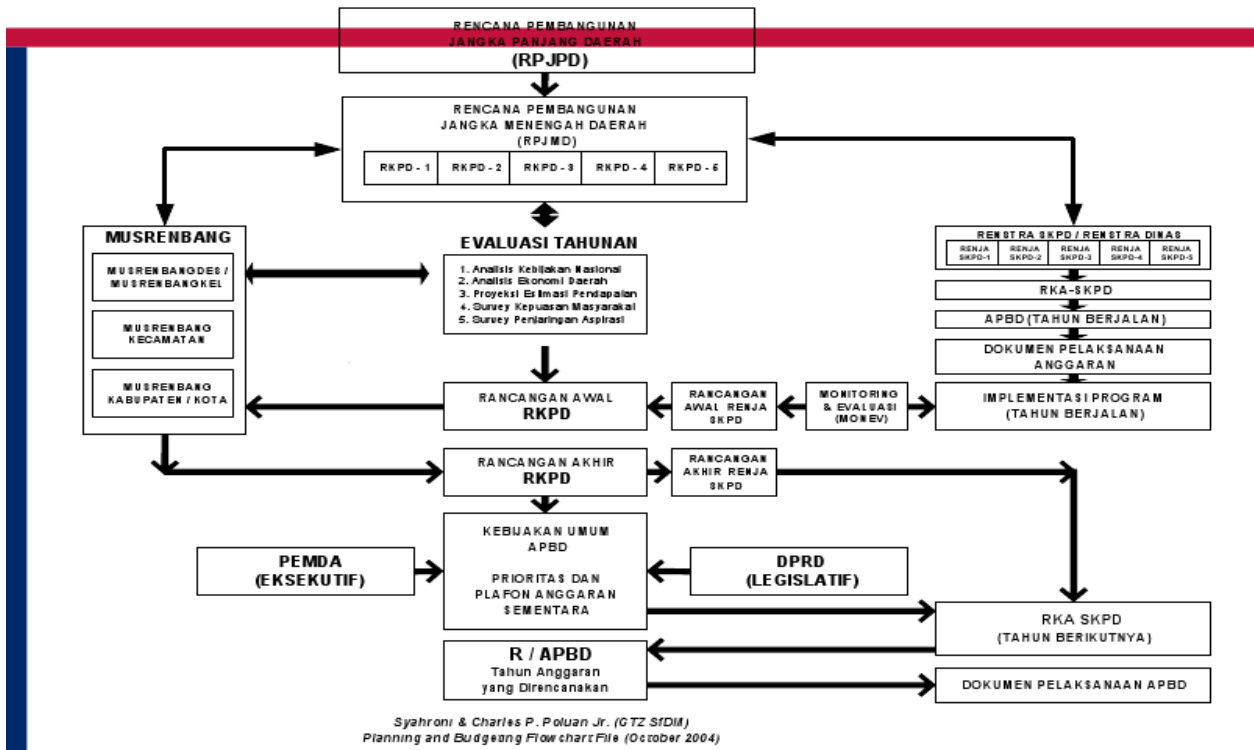
- RKPD pedoman bagi penyusunan RAPBD
- RKPD memuat program dan kegiatan bersifat :
  - a. Terukur (*measurable*)
  - b. Dapat dilaksanakan (*workable*)

Rencana Kerja Badan/Dinas/Instansi yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Badan/Dinas/Instansi untuk untuk periode 1 (satu) tahun.

## Alur Perencanaan dan Penganggaran Jangka Panjang, Menengah & Tahunan



## PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN DAERAH



Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indicator kinerja sasaran, dan rencana yang ingin dicapainya, selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektorlain.

### 1. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagai mana dimuat dalam dokumen Renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

### 2. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-

program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### **3. Kegiatan**

Kegiatan adalah tindakannya dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencanacapaiannya.

### **4. Indikator Kinerja Kegiatan**

Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan dalam kelompok :

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (Outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja disetiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi, indikator kinerja dimaksud hendaknya spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan tidak bias.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Pemerintah (Dinas/Badan/Intansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), ada beberapa landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan serta penganggaran, antara lain:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 12 Agustus 2016 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai dokumen Perencanaan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan dalam melaksanakan program/kegiatan pada tahun berikutnya (Tahun 2024).
- b. Untuk menetapkan target dan capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
- c. Sebagai salah satu sarana/wadah dalam menampung aspirasi masyarakat yang didapat dari evaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

## **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG TAHUN LALU**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2021 dan Capaian Renstra OPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- C. Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi OPD
- D. Review Terhadap Rancangan Awal OPD

- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN**

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- C. Program dan Kegiatan

**BAB IV. PENUTUP**

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGHUBUNG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN LALU**

**A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dibandingkan Tahun sebelumnya (2020), alokasi dana/anggaran pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mengalami sedikit penambahan, adapun perbandingan alokasi dana/anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Program/Kegiatan dan Alokasi Dana Belanja Langsung**  
**Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 s/d 2021**

No	Tahun	Program	Kegiatan	Alokasi Dana (Rp)
1	2017	9	34	6.977.620.779
2	2018	9	44	14.044.754.437
3	2019	9	38	17.525.768.591
4	2020	9	37	11.479.358.466
5	2021	2	9	12.766.532.931

*Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat 2021*

Pada Tahun Anggaran 2021, Badan Penghubung mendapat alokasi sebesar Rp. 12.766.532.931,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.490.372.903,- (97.84%) yang terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 10.197.777.506,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.109.955,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.833.516,- atau sebesar 97.17% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pada Sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.893.000 ,-

- **Out put** : Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan RKT,PK, Renstra dan Renja
- **Outcome** : Tersedianya dokumen perencanaan
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 1.886.400,- (99,65%)



b. Koordinasi Penyusunan DPA SKPD

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.957.955,-

- **Out put** : Tersedianya dokumen penganggaran (RKA, DPA dan Anggaran Kas )
- **Outcome** : Terselenggaranya Penganggaran Badan Penghubung
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 22.669.136,- (98,74%)

c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 17.084.000,-

- **Out put** : Tersedianya dokumen penganggaran (RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA Pergeseran, DPA Perubahan dan Anggaran Kas
- **Outcome** : Terselenggaranya Penganggaran Badan Penghubung
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 16.107.880,- (94,29%)

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.175.000,-

- **Out put** : Tersedianya dokumen evaluasi Badan Penhubung ( LAKIP, LPPD,LKPJ,Laporan Tahunan)
- **Outcome** : Terselenggaranya evaluasi kinerja Badan Penghubung
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 3.170.100,- (99,85%)

2. Kegiatan Administrsai Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.315.437.464,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.175.053.001,- atau sebesar 97.78% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.069.215.890,-

- **Out put** : Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada Badan Penghubung 1 tahun
- **Outcome** : Terselenggaranya tertib administrasi keuangan Badan Penghubung
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 6.931.525.002,- (97,73%)

b. Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 215.811.074,-

- **Out put** : Tersedianya pembayaran honor 1 tahun
- **Outcome** : Terselenggaranya tertib administrasi keuangan Badan Penghubung
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 213.232.900,- (98,81%)

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.962.000,-

- **Out put** : Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- **Outcome** : Terselenggaranya tertib administrasi keuangan Badan Penghubung
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 8.927.600,- (99,62%)

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.448.500,-

- **Out put** : Terlaksananya penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
- **Outcome** : Terselenggaranya tertib administrasi keuangan Badan Penghubung
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 21.367.499,- (99,62%)

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 243.049.806,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 228.630.984,- atau sebesar 94,07% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah SKPD

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.834.000,-

- **Out put** : Tersedianya Laporan Kebutuhan barang milik daerah
- **Outcome** : Terselenggaranya administrasi barang milik daerah
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 12.387.200,- (96,52%)

b. Pengamanan Barang Milik Daerah

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 153.692.000,-

- **Out put** : Terlaksananya pembayaran PBB asrama mahasiswa minang, premi asuransi bangunan milik daerah dan kendaraan operasional kantor.
- **Outcome** : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 141.325.645,- (91,95%)

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 76.523.806,-

- **Out put** : Terlaksananya Pembinaan, pengendalian dan Pengawasan barang milik daerah
- **Outcome** : Terselenggaranya administrasi barang milik daerah
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 74.918.139,- (97.90%)

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 131.162.600,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 127.830.100,- atau sebesar 97,46% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pada Sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 63.750.000,-

- **Out put** : Tersedianya Pakaian Dinas dan kelengkapannya
- **Outcome** : Meningkatnya pelayanan administrasi Kedinasan
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 60.637.500,- (95,12%)

b. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

Pada Sub Kegiatan ini ialokasikan anggaran sebesar Rp. 62.300.000,-

- **Out put** : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- **Outcome** : Meningkatnya pelayanan administrasi Kedinasan dan SDM
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 60.637.500,- (99,65%)

c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan Anggaran Sebesar Rp. 5.112.600,-

- **Out put** : ASN yang mengikuti Bimtek 3 orang
- **Outcome** : Meningkatnya pelayanan administrasi Kedinasan dan SDM
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 60.637.500,- (99,65%)

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 474.999.668,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 471.013.196,- atau sebesar 99,16% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 19.864.000,-

- **Out put** : Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan kantor
- **Outcome** : terselenggaranya administrasi umum kantor
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 19.817.000,- (99,76%)

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 66.013.000

- **Out put** : Terlaksananya pengadaan alat alat rumah tangga
- **Outcome** : terselenggaranya administrasi umum kantor
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 65.069.000,- (98,57%)

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 94.400.000,-

- **Out put** : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
- **Outcome** : terselenggaranya administrasi umum kantor
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 93.459.430,- (99%)

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 27.360.500,-

- **Out put** : Terlaksananya cetak dan penggandaan yang menunjang operasional kantor
- **Outcome** : terselenggaranya administrasi umum kantor
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp.27.087.500,- (99,00%)

e. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.860.000,-

- **Out put** : Jumlah surat kabar, majalah dan buku bacaan.
- **Outcome** : Meningkatnya wawasan dan informasi aparatur Badan Penghubung.
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 1.810.000 ( 97,31 %)

f. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan Anggaran sebesar Rp. 33.000.000

- **Out put** : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu pada Badan Penghubung
- **Outcome** : Lancarnya kegiatan Badan Penghubung
- **Realisasi** : Fisik 100% Keuangan Rp. 32.990.847,- ( 99,97 %)

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 232.502.168

- **Out put** : keikutsertaan dalam rapat rapat koordinasi di dalam dan diluar daerah
- **Outcome** : terselenggaranya administrasi umum kantor
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 230.779.419,- (99.26%)

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 411.582.619,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 400.647.500,- atau sebesar 97,34% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 257.871.120

- **Out put** : tersedianya peralatan dan mesin gedung kantor
- **Outcome** : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 248.647.500,- (96,42%)

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 153.711.499

- **Out put** : Tersedianya sarana dan prasarana pada asrama mahasiswa minang dan anjungan Sumatera Barat TMII
- **Outcome** : Meningkatnya sarana dan prasarana kantor
- **Realisasi** : Fisik 100%, Keuangan Rp. 152.000.000,- (99.26%)

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.027.143.777,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.979.751.925,- atau sebesar 97,66% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada Sub Kegiatan ini Dialokasikan Anggran Sebesar Rp. 12.075.000

- **Output** : Terpenuhinya kebutuhan materai dan terlaksananya penjemputan dan pengiriman surat menyurat kantor.
- **Outcome** : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp.11.983.622 ,- ( 99,24%)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 286.906.100

- **Out put** : Terpenuhinya kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi Badan Penghubung.
- **Outcome** : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 250.203.868 ,- ( 87,21%).

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada Sub kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.728.162.677,-

- **Out put** : tersedianya tenaga pelayanan umum dan dukungan penerapan new normal.
- **Outcome** : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 1.717.564.435 ,- ( 99,39%).

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 549.291.617,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 455.784.827,- atau sebesar 97,18% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 192.527.617,-

- **Out put** : Terpeliharanya Kendaraan Operasional Kantor
- **Outcome** : terselenggaranya Pelayanan, Sarana dan Prasarana
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 191.276.350 ,- ( 99,35%).

b. Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya

Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 34.890.000,-

- **Out put** : Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya
- **Outcome** : terselenggaranya Pelayanan, Sarana dan Prasarana
- **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 34.380.000 ,- ( 98,54 %).

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 231.850.000,-
- **Out put** : Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
  - **Outcome** : terselenggaranya Pelayanan, Sarana dan Prasarana
  - **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 219.325.477 ,- ( 94,60 %).
- d. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 90.024.000,-
- **Out put** : Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
  - **Outcome** : terselenggaranya Pelayanan, Sarana dan Prasarana
  - **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 88.803.000 ,- ( 98,64 %).

II. Program Pelayanan Penghubung Rp. 2.568.755.425,- dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat  
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.568.755.425,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.529.827.854,- atau sebesar 98,48% yang terdiri atas beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.387.914.058,-
- **Out put** : terlaksananya pengelolaan asrama mahasiswa minang dan sewa kantor, rumah, jabatan dan mess karyawan
  - **Outcome** : Meningkatnya Pelayanan Kedinasan
  - **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 1.383.899.942 ,- ( 99,71 %).
- b. Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Pemerintah  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggara sebesar Rp. 215.624.151,-
- **Out put** : terlaksananya pelayanan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah
  - **Outcome** : Meningkatnya Pelayanan Kedinasan
  - **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 187.830.852 ,- ( 87,11 %).

- c. Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan pelestarian Seni dan Budaya  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 157.932.778,-
- **Out put** : terselenggaranya promosi produk unggulan dan pelestarian senidaerah
  - **Outcome** : Meningkatnya Pelayanan Kedinasan
  - **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 155.158.620 ,- ( 98,24 %).
- d. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 37.672.000,-
- **Out put** : terselenggaranya pameran produk unggulan dan pelestarian senidaerah
  - **Outcome** : Meningkatnya Pelayanan Kedinasan
  - **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 35.387.883 ,- ( 93,94 %).
- e. Koordinasi dan Sikronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung  
Pada Sub Kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 769.612.438,-
- **Out put** : terselenggaranya Pelayanan kedinasan
  - **Outcome** : Meningkatnya Pelayanan Kedinasan
  - **Realisasi** : Fisik 100 %, Keuangan Rp. 767.550.557 ,- ( 99,73 %).

Selanjutnya hal berkenaan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat serta pencapaian renstra sampai tahun 2021 tertuang pada **(Tabel T.C-29)**

Namun dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terdapat perubahan pada penempatan program dan kegiatan.



**TABEL T.C-29**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGHUBUNG S/D TAHUN 2021**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

KOD E	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN (Permendagri No. 19 tahun 2019)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2021 (RENSTRA SKPD TAHUN 2021)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DARI KEGIATAN SKPD TAHUN 2019			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN (TAHUN 2020)
						TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		
1	2		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10
	<b>URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>							
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	32.738.000	15.795.647	48,25	12 Bulan	100%
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran tagihan listrik, telpon, Internet dan WN IP	12 Bulan	12 Bulan	322.100.000	247.726.614	76,91	12 Bulan	100%

3	Penyediaan jasa kebersihan, pengaman dan sopir kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Tersedianya jasa sopir Badan Penghubung	12 Bulan	12 Bulan	1.482.879.000	1.346.564.452	95,35	12 Bulan	100%
		<b>Kegiatan administrasi Barang Milik Daerah Pasa Perangkat Daerah</b>								
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pembayaran PBB asrama putra dan putri minang dan pembayaran premi asuransi kendaraan dinas operasional	PBB 3 asrama dan asuransi 15 kendaraan dinas	PBB 3 asrama dan asuransi 9 kendaraan dinas	190.465.000	181.599.185	95,35	PBB 3 asrama dan asuransi 3 bangunan asrama dan 15 kendaraan dinas	100%
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	74.424.625	74.424.625	100	12 Bulan	100%
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	42.312.000	42.033.600	99,34	12 Bulan	100%
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								

7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya pengadaan mesin faximile dan mesin absen wajah	1 unit mesin faximili, 1 unit mesin absensi wajah	1 unit mesin faximili, 1 unit mesin absensi wajah	2.753.500	2.710.000	98,44	12 Bulan	100%
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Kantor Penghubung	12 Bulan	12 Bulan	130.000.000	129.461.860	99,59	12 Bulan	100%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan komponen listrik kantor	1 tahun						
		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, buku peraturan dan bacaan lainnya	12 Bulan	12 Bulan	18.720.000	18.677.600,00	99,77	12 Bulan	100%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya rapat dan koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	12 Bulan	452.279.868	449.895.698	99,47	1 Tahun	100%
11	Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi		Terlaksananya penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi kegiatan Kantor Penghubung		12 Bulan	17.356.000	17.209.500	99,16		

12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu kantor pada Kantor Penghubung	12 Bulan	12 Bulan	74.500.000	74.329.414	99,77	1 Tahun	100%
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>							
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan informasi	1 unit mesin fax, 1 unit handycam, 1 unit infocus, 3 unit camera digital dan 9 unit telpon	1 unit mesin fax, 1 unit handycam, 1 unit infocus, 3 unit camera digital dan 9 unit telpon	1.100.000	1.100.000	100	1 unit mesin fax, 1 unit handycam, 1 unit camera digital dan 1 unit telepon	100%

14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Tahun untuk 15 kendaraan dinas operasional	1 Tahun untuk 10 kendaraan dinas operasional	173.900.000	156.896.443	90,22	1 Tahun untuk 15 kendaraan dinas operasional	100%
15	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	<i>masuk dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya</i>	Terpeliharanya peralatan komputer dan jaringan komputerisasi kantor	31 unit komputer, 7 unit printer, 3 unit laptop, 5 notebook yang di service dan penggantian suku cadang selama 1 tahun	31 unit komputer, 7 unit printer, 3 unit laptop, 5 notebook yang di service dan penggantian suku cadang selama 1 tahun	14.994.150	14.781.300	98,58	25 unit komputer, 5 unit printer, 3 unit laptop yang di service dan penggantian suku cadang selama 1 tahun	100%
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan /Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	3 asrama, 9 Bangunan Anjungan	3 asrama, 9 Bangunan Anjungan	20.000.000	19.978.750	99,89	3 asrama, 9 Bangunan Anjungan	100%
17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan /Rehabiltasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan	2 unit mesin tik, 5 unit dispenser, 1 unit mesin fotocopy, 1 unit finger print dan 2 unit plang nama	2 unit mesin tik, 5 unit dispenser, 1 unit mesin fotocopy, 1 unit finger print dan 2 unit plang nama	8.150.000	8.150.000	100	2 unit mesin tik, 4 unit dispenser, 1 unit mesin fotocopy, 1 unit finger print, 2 unit mesin hitung dan 2 unit plang nama	100%

		<b>Program Pelayanan Penghubung</b>								
		<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>								
18	Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya penyediaan jasa sewa mess dan sewa gedung kantor	-	12 Bulan	1.355.208.000	1.351.981.786	99,76	12 Bulan	100%
		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kegiatan Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Meningkatnya disiplin aparatur Kantor Penghubung</b>							
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	54 orang pegawai dan 18 orang protokol	-	-	-	-	87 Orang	100%
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur</b>							
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan Aparatur	1 kali	2 orang	13.380.750	13.380.750	100	1 kali	100%
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas	6 orang	3orang	15.000.000	14.527.675	96,85	6 orang	100%

<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan</b>							
21	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya pembuatan RKA, DPA, DPPA, RKT dan Renja	12 Bulan	12 Bulan	10.523.088	10.523.088	96,8	1 Dokumen RKA, DPA dan DPPA, RKT dan Renja	100%
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								
		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun					1 Tahun	100%
22	Penatausahaan Keuangan SKPD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pembayaran honorarium PA, PPK, PPTK, Bendahara dan SIPKD, LAKIP	12 Bulan	12 Bulan	109.800.000	105.900.000	96.45	12 bulan	100%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD								
		<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>								



23	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengembangan sistem pelaporan	Laporan realisasi fisik dan keuangan (12 bulan) LKPJ dan Laporan Kinerja Pertriwulan (T1-T4)	Laporan realisasi fisik dan keuangan (12 bulan) LKPJ dan Laporan Kinerja Pertriwulan (T1-T4)	11.912.000	11.851.400	99,49	Laporan realisasi fisik dan keuangan (12 bulan) LKPJ dan Laporan Kinerja Pertriwulan (T1-T4)	100%
		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah</b>								
24	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD dan sosialisasi pengelolaan aset kepada pegawai Kantor Penghubung	12 Bulan	12 Bulan	77.659.000	71.033.200	91,47	12 Bulan	100%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah								
		Program Pelayanan Penghubung								
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>Meningkatnya pelayanan kedinasan</b>							
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan tamu Pemerintah Daerah di luar Sumatera Barat	12 bulan	12 bulan	553.718.200	553.235.326	99,91	12 bulan	100%

VII	Program Peningkatan Pelayanan Publik		Meningkatnya pelayanan publik							
26	Promosi potensi daerah dengan Kementerian/Lembaga terkait	PPeningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Kerjasama promosi potensi daerah pada kementerian atau instansi terkait	1 kali kegiatan (140 orang)	1 kali kegiatan (140 orang)				12 bulan	100%
27	Peningkatan motivasi Generasi Muda Minang di Perantauan	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya fasilitas pertemuan dan peningkatan motivasi generasi muda perantau minang se Jabodetabek	1 kali kegiatan dengan 150 orang peserta	1 kali kegiatan dengan 150 orang peserta				12 bulan	100%
28	Gelar citra promosi daerah dalam paket khusus Anjungan Sumbar TMII	PPeningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Gelar Citra Promosi Daerah dalam acara paket khusus di Anjungan Sumbar TMII	10 kegiatan	10 kegiatan	25.400.000	25.277.993	99,52	10 kegiatan	100%
30	Pengelolaan Asrama Mahasiswa Putra dan Putri Minang Yogyakarta dan Bogor		Terlaksananya pengelolaan asrama mahasiswa minang di Yogyakarta	-	-	96.278.800	95.682.069	99,38	asrama yogya dan bogor (3 tenaga pengelola/pengamanan asrama)	100%
VIII	Program Pengembangan Data dan Informasi		Meningkatnya program pengembangan data informasi dan komunikasi							
31	Pembuatan buku agenda Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumbar	PPeningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Buku Agenda Kantor Penghubung Pemprov. Sumatera Barat	200 buku agenda	200 buku agenda				200 buku agenda	100%
32	Pengelolaan promosi dan informasi Sumbar melalui Sumbar TV	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Meningkatnya pengembangan data dan informasi Sumatera Barat	12 Bulan	12 Bulan	78.072.400	77.382.172	99,12	12 bulan	100%

IX	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan Pemda	100%	100%					
34	Sumatera Barat expo	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terselenggaranya Sumatera Barat EXPO 2016	1 kali kegiatan (1000 undangan)	1 kali kegiatan (1000 undangan)	29.200.600	28.367.556	97,15	1 kali kegiatan (600 undangan)	100%
35	Peningkatan kualitas kerohanian dan ceramah agama bagi Masyarakat Minang	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan ceramah dibidang kerohanian/agama serta silaturahmi antar sesama perantau minang	4 kali kegiatan (1000 orang)	4 kali kegiatan (1000 orang)	5.450.000	2.679.400	49,16	1 kali kegiatan	100%
36	Sosialisasi Program Pembangunan Sumatera Barat kepada Tokoh Masyarakat Minang Jabodetabek	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan sosialisasi hasil-hasil pembangunan Sumatera Barat kepada masyarakat Minang se Jabodetabek	1 kali kegiatan (150 orang)	1 kali kegiatan (150 orang)				1 kali kegiatan (150 orang)	100%
37	Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Event Promosi di Jakarta	PPeningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Kerjasama promosi potensi daerah pada kegiatan event promosi di Jakarta	1 kali kegiatan	12 Bulan				1 kali kegiatan	100%
38	Akselerasi Pengurusan Manajemen Pemerintahan Daerah ke Pemerintahan Pusat	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terselenggaranya koordinasi dan pengurusan kepentingan daerah ke kementerian, instansi/lembaga pusat	12 bulan	12 Bulan	187.094.000	179.775.963	96,09	12 bulan	100%

Untuk lebih jelasnya hasil realisasi anggaran Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Capaian Program dan Kegiatan Badan Penghubung Tahun Anggaran 2021**

NO	KODE REKENING	URAIAN	DANA Rp.	REALISASI		KETR.  SISA ANGGARAN	
				Fisik %	Keuangan Rp.		
1	2	3	4	6	7	8	9
		<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>12.766.532.931</b>	<b>100</b>	<b>12.490.372.903</b>	<b>97,84</b>	<b>276.160.028</b>
<b>I</b>	<b>5.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>10.197.777.506</b>	<b>100</b>	<b>9.960.545.049</b>	<b>97,67</b>	<b>237.232.457</b>
	<b>5.07.01 1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>45.109.955</b>	<b>100</b>	<b>43.833.516</b>	<b>97,17</b>	<b>1.276.439</b>
1	5.07.01 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.893.000	100	1.886.400	99,65	6.600
2	5.07.01 1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.957.955	100	22.669.136	98,74	288.819
3	5.07.01 1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.084.000	100	16.107.880	94,29	976.120
4	5.07.01 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.175.000	100	3.170.100	99,85	4.900
	<b>5.07.01 1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.315.437.464</b>	<b>100</b>	<b>6.175.053.001</b>	<b>97,78</b>	<b>140.384.463</b>
5	5.07.01 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	6.069.215.890	100	5.931.525.002	97,73	137.690.888
6	5.07.01 1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	215.811.074	100	213.232.900	98,81	2.578.174
7	5.07.01 1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.962.000	100	8.927.600,00	99,62	34.400
8	5.07.01 1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	21.448.500	100	21.367.499	99,62	81.001

Rencana Kerja Tahun 2022

	<b>5.07.01 1.03</b>	<b>Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>243.049.806</b>	<b>100</b>	<b>228.630.984</b>	<b>94,07</b>	<b>14.418.822</b>
9	5.07.01 1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12.834.000	100	12.387.200	96,52	446.800
10	5.07.01 1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	153.692.000	100	141.325.645	91,95	12.366.355
11	5.07.01 1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	76.523.806	100	74.918.139	97,90	1.605.667
	<b>5.07.01 1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>131.162.600</b>	<b>100</b>	<b>127.830.100,00</b>	<b>97,46</b>	<b>3.332.500</b>
12	5.07.01 1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	63.750.000	100	60.637.500,00	95,12	3.112.500
13	5.07.01 1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundangan	62.300.000	100	62.080.000,00	99,65	220.000
14	5.07.01 1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5.112.600	100	5.112.600	100,00	0
	<b>5.07.01 1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>474.999.668</b>	<b>100</b>	<b>471.013.196</b>	<b>99,16</b>	<b>3.986.472</b>
15	5.07.01 1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.864.000	100	19.817.000	99,76	47.000
16	5.07.01 1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.013.000	100	65.069.000	98,57	944.000
17	5.07.01 1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.400.000	100	93.459.430	99,00	940.570
18	5.07.01 1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.360.500	100	27.087.500	99,00	273.000
19	5.07.01 1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.860.000	100	1.810.000	97,31	50.000
20	5.07.01 1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.000.000	100	32.990.847	99,97	9.153
21	5.07.01 1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.502.168	100	230.779.419	99,26	1.722.749
	<b>5.07.01 1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>411.582.619</b>	<b>100</b>	<b>400.647.500,00</b>	<b>97,34</b>	<b>10.935.119</b>
22	5.07.01 1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	257.871.120	100	248.647.500	96,42	9.223.620
23	5.07.01 1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.711.499	100	152.000.000	98,89	1.711.499
	<b>5.07.01 1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.027.143.777</b>	<b>100</b>	<b>1.979.751.925</b>	<b>97,66</b>	<b>47.391.852</b>

*Rencana Kerja Tahun 2022*

24	5.07.01 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.075.000	100	11.983.622	99,24	91.378
25	5.07.01 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	286.906.100	100	250.203.868	87,21	36.702.232
26	5.07.01 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.728.162.677	100	1.717.564.435	99,39	10.598.242
	<b>5.07.01 1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>549.291.617</b>	<b>100</b>	<b>533.784.827</b>	<b>97,18</b>	<b>15.506.790</b>
27	5.07.01 1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.527.617	100	191.276.350	99,35	1.251.267
28	5.07.01 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.890.000	100	34.380.000	98,54	510.000
29	5.07.01 1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	231.850.000	100	219.325.477	94,60	12.524.523
30	5.07.01 1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.024.000	100	88.803.000	98,64	1.221.000
<b>II</b>	<b>5.07.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>2.568.755.425</b>	<b>100</b>	<b>2.529.827.854</b>	<b>98,48</b>	<b>38.927.571</b>
	<b>5.07.02 1.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>2.568.755.425</b>	<b>100</b>	<b>2.529.827.854</b>	<b>98,48</b>	<b>38.927.571</b>
31	5.07.02 1.01.01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	1.387.914.058	100	1.383.899.942	99,71	4.014.116
32	5.07.02 1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	215.624.151	100	187.830.852	87,11	27.793.299
33	5.07.02 1.01.03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	157.932.778	100	155.158.620	98,24	2.774.158
34	5.07.02 1.01.04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	37.672.000	100	35.387.883	93,94	2.284.117
35	5.07.02 1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	769.612.438	100	767.550.557	99,73	2.061.881

**Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2021**

## A. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Capaian kinerja pelayanan OPD dapat diukur berdasarkan indikator kinerja dari kegiatan pada OPD. Sedangkan Indikator suatu kegiatan OPD terkait erat dengan kondisi tugas dan fungsi OPD.

Jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi sasaran pada Tahun 2020, realisasi pencapaian sasaran dan penyerapan dana (keuangan) Tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Alokasi Dana, Pencapaian Sasaran Serta Realisasi Penyerapan Dana/Anggaran Tahun 2017 s/d 2020**

Tahun	Alokasi Dana/ Anggaran	Pencapaian Sasaran (%)	Realisasi Program/Kegiatan		
			Fisik (%)	Keuangan (%)	%
2017	8.736.643.348	100	100	7.993.439.050	91,49
2018	14.044.754.437	100	98.42	12.725.909.701	90.61
2019	17.525.768.591	100	99.77	15.864.930.693	90.52
2020	11.479.358.446	100	94.04	10.786.325.298	93.96
2021	12.766.532.931	100	97.84	12.490.372.903	97,84

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2021

Perbandingan pencapaian sasaran strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021 yaitu :

**Tabel 2.4**  
**Perbandingan Realisasi Tingkat Capaian 2020 s/d 2021**

No	Sasaran Strategis	Realisasi Tingkat Capaian	
		Tahun 2020	Tahun 2021
1	Terfasilitasinya koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Daerah, Perwakilan Asing dan Lembaga Non-Pemerintah	100%	
	Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah		100%
2	Terlaksananya promosi potensi daerah Sumatera Barat	100%	

	Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan		100%
3	Meningkatnya sinergitas serta koordinasi dengan perantau Sumatera Barat	100%	
	Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat		100%
4	Pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada pimpinan daerah selama pelaksanaan tugas di luar Sumatera Barat	100%	

**Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2021**

Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pada Tahun 2021 telah baik terbukti dari capaian program dan kegiatan yang mencapai 100%. sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Tahun 2021-2026 terdapat perubahan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan

Indikator dan tolok ukur kinerja yang digunakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung sebagai berikut :

**Tugas Pokok :**

"Membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta"

**Fungsi :**

- a. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta.
- b. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di Jakarta.
- c. Penyelenggaraan promosi daerah di Jakarta.
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan, dan aset kantor.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor.
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- g. Pembinaan jabatan fungsional.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.



Berdasarkan capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya proses perencanaan dan penganggaran dengan telah disusunnya dengan baik Dokumen Renstra, Renja, RKT, IKU, PK, DPA, DPA Perubahan serta Dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ Pada Badan Penghubung
- b. Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi ASN Badan Penghubung selama 1 tahun dan lancarnya pembayaran honorarium yang diiringi dengan telah dilakukannya koordinasi-koordinasi dalam penyusunan Laporan Keuangan baik laporan keuangan bulanan, triwulan, semester maupun akhir tahun
- c. Terlaksananya perencanaan barang milik daerah dengan telah disusunnya dokumen kebutuhan barang milik daerah serta terlaksananya pembayaran asuransi barang milik daerah sebagai salah satu usaha pengamanan barang milik daerah dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Selain hal di atas terlaksananya pengadaan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai penunjang kelancaran dan penopang pelaksanaan tugas pelayanan.
- d. Lancarnya pengurusan dan pendataan serta penataan bidang kepegawaian bagi ASN pada badan penghubung sehingga ASN tidak mendapatkan kendala untuk urusan kepegawaian dan di lain sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga terus di tingkatkan dengan melaksanakannya sosialisasi perauran perundang-undangan dan mengirim ASN untuk mengikuti bimtek
- e. Terjaminnya kelancaran aktifitas dan administrasi kantor dengan menyediakan kebutuhan peralatan dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan pelayanan terhadap tamu yang datang di Badan Penghubung
- f. Terlaksananya Pengurusan Manajemen Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat terealisasi dan instansi lainnya dengan capaian 100%. Kegiatan pelayanan kelembagaan ini bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi dan pengurusan kepentingan daerah ke kementerian, instansi/lembaga pusat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan perantau dan generasi muda minang di perantauan
- g. Terlaksananya promosi produk unggulan dan pelestarian terhadap budaya minang kabau termasuk terlaksananya pengelolaan Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah dengan baik walaupun di tengah pandemi Covid 19 namun promosi, pelayanan dan penyampaian informasi Sumatera Barat tetap diupayakan maksimal.
- h. Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah terealisasi dengan capaian 100%. Adapun indikator dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas kedinasan kepala

daerah, pejabat dan pimpinan terkait selama melaksanakan tugas di Jakarta dan diluar Sumatera Barat. Sarana dan Prasarana tersebut adalah kendaraan dinas operasional yang terawat beserta tenaga pengemudi (sopir) serta ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan.

## **B. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ibu Kota Negara Jakarta. Secara garis besarnya pelaksanaan tugas tersebut mencakup segala aspek pemerintahan, sehingga pelaksanaan tugas seyogyanya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sebagai "Duta Besar" Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kewenangan Badan Penghubung relatif kecil dikarenakan masih dipimpin oleh eselon III, sedangkan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Wakil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta sangat kompleks, antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta dan diluar Provinsi Sumatera Barat.
2. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar kementerian/non kementerian dan lembaga di Jakarta.
3. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan dan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ada di luar Sumatera Barat.
4. Memfasilitasi dan menjembatani perantau minang yang ada di Indonesia maupun internasional dalam memberikan informasi mengenai Sumatera Barat.
5. Mempromosikan Sumatera Barat dalam bidang wisata, budaya dan investasi pada tingkat nasional dan internasional.

Sebagai informasi, perantau minang yang berjumlah sekitar 7 juta orang merupakan aset terbesar Sumatera Barat dalam percepatan pembangunan di Sumatera Barat. Dalam mengakomodir ide/partisipasi perantau minang ini diperlukan wadah dan anggaran yang cukup besar sehingga kedepannya kita dapat mewujudkan kolaborasi yang dinamis antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan perantau minang dalam memajukan pembangunan di Sumatera Barat.

Disamping tugas dan tanggungjawab diatas, sampai dengan tahun 2021 ini, Badan Penghubung telah banyak melaksanakan kegiatan yang sifatnya strategis meskipun ditengah keterbatasan ruang dan gerak karena pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan Dunia secara global maka hal ini berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pada badan

penghubung yang menyebabkan ada beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, antara lain :

1. Kegiatan Sumbar Expo yang sudah mendapatkan pengakuan dari media nasional dalam mempromosikan Sumatera Barat.
2. Kegiatan sosialisasi dan silaturahmi dengan perantau minang mengenai visi, misi dan program-program strategis daerah.
3. Kegiatan penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak dan elektronik (siaran radio, Televisi, koran)
4. Menjadi penggagas dalam peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Penghubung se-Indonesia dengan Kementerian PAN dan RB.
5. Ikut serta dalam berbagai kegiatan Kerjasama promosi potensi daerah dengan Kementerian terkait.
6. Optimalisasi fungsi Anjungan Sumatera Barat TMII sebagai etalase Pariwisata dan Budaya Sumatera Barat.

Gambaran Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan analisa SWOT yakni Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang), dan Threats (ancaman/ tantangan) adalah sebagai berikut:

#### **1. Kekuatan (Strengths)**

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a. Dukungan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Bangunan kantor baru yang megah terdiri dari 13 lantai dengan arsitektur bagongjong di puncaknya merupakan simbol etnik dan kebanggaan masyarakat Minang terutama perantauan Minang di Jakarta
- c. Lokasi kantor yang strategis, terletak di kawasan perempatan Matraman Raya, dan dapat dicapai dari berbagai penjuru dan memiliki akses lalu lintas ke tempat-tempat penting di kawasan DKI Jakarta
- d. Aset/sumber daya masyarakat Minang di Jakarta yang cukup besar
- e. Besarnya potensi daerah yang dapat "dijual" dipromosikan kepada masyarakat, investor baik dalam maupun luar negeri.

- f. Pengelolaan Anjungan Sumatera Barat TMII di Bawah Badan Penghubung sehingga membantu Badan Penghubung menjalankan tugas promosi dan penyampaian informasi mengenai pariwisata dan budaya Sumatera Barat.

**2. Kelemahan(Weaknesses)**

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.
- b. Susahnya mendapatkan data dari daerah secara cepat dan akurat, sehingga mengganggu kualitas pelayanan informasi kepada pihak yang membutuhkan.
- c. Kapasitas kelembagaan yang mempengaruhi kewenangan.
- d. Kekurangan bahan-bahan promosi secara memadai tentang industri, kerajinan, kesenian, makanan, pariwisata, baik berupa benda, brosur-brosur, buku-buku, pamphlet maupun rekaman (CD).
- e. Kurang terjalin kerjasama yang optimal dengan pemerintah daerah (Kab/Kota).

**3. Peluang (Opportunities)**

- a. Akses utama dalam informasi, teknologi dan transformasi disegala bidang.
- b. Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah.
- c. Pusat Pemerintah dan kementerian berada di Jakarta.
- d. Jalur strategis untuk komunikasi dan koordinasi bagi semua perantau minang di Indonesia.

**4. Ancaman/Tantangan (Threats)**

- a. Persaingan di segala bidang dan promosi yang semakin ketat
- b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan institusi pemerintah yang semakin tinggi
- c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin tinggi

Disamping analisa SWOT diatas, dapat kami gambarkan aspek-aspek strategis Badan Penghubung lainnya dalam pelaksanaan tupoksinya, antara lain:

**Tabel 2.6**  
**Aspek Strategis Badan Penghubung**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aspek Strategis</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Letak/Posisi	Di Jalur strategis, Jln.Matraman Raya no.19, akses yang cepat ke Kantor Kementrian/lembaga.	Satu gedung dengan Hotel Balairung dan Bank Nagari
2	Sarana dan Prasarana	14 unit kendaraan dinas operasional, 2 unit motor dan peralatan serta perlengkapan kantor yang memadai	Dalam melayani pejabat daerah yang bertugas di Jakarta

3	Promosi dan Publikasi	Melalui media cetak serta elektronik, Sumbar TV dan Website Badan Penghubung	Pada media elektronik RRI, TVRI, Padang TV dan internet
4	Palaksanaan tugas pemerintahan	Lokasi kementrian/lembaga yang berpusat di Jakarta memudahkan dalam koordinasi pelaksanaan tugas	Percepatan dalam proses administrasi urusan pemerintahan.
5	Sosial budaya	Komunikasi yang intens dengan Bakor/Paguyuban perantau minang yang ada/berpusat di Jakarta.	Selalu ikut serta secara aktif dalam berbagai kegiatan sosial budaya serta keagamaan dengan perantau minang.
6	Pariwisata	Anjungan Sumatera Barat TMII yang berada dibawah pengelolaan Badan penghubung	Memudahkan promosi dan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat

**Sumber : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, 2021**

Disamping aspek strategis tersebut serta berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2021 terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu pertimbangan dalam menindaklanjutinya, antara lain :

1. Dalam Pelaksanaan tugas Badan Penghubung dalam hal hubungan antar lembaga, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :
  - a. Masih belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dialog melalui media televisi dan radio, sehingga informasi yang disampaikan belum efektif dalam memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat Sumatera Barat (perantau) untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
  - b. Masih belum terfasilitasi dengan baik kesepakatan diantara para Bakor Minang di Jakarta dan sekitarnya dalam memberikan ide-ide/masukan sebagai bentuk partisipasi dalam musrenbang Provinsi.

Solusi yang diharapkan adalah :

- a. Perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dalam pencapaian sasaran terhadap kegiatan dialog radio dan televisi, sehingga kedepannya, dapat membawa manfaat dalam meningkatkan wawasan masyarakat minang mengenai program-program pembangunan di Sumatera Barat.
- b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan, baik dalam penentuan tema, bentuk acara serta sasaran yang akan dicapai, sehingga apa yang dibutuhkan oleh perantau minang dalam hal menyampaikan ide-ide/masukan dapat difasilitasi oleh Badan Penghubung.

2. Permasalahan di Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas rutin pelayanan tamu, adalah sebagai berikut :
  - a. Masih kurangnya pelatihan untuk tenaga protokoler di Badan Penghubung dalam pelayanan dan fasilitasi kegiatan pimpinan/pejabat daerah.
  - b. Masih belum efektifnya pelaksanaan Pergub Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2006 mengenai pelayanan tamu dan pimpinan (perlu direvisi).Alternatif solusi untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Provinsi Sumbar dan Kemendagri dalam rencana pelaksanaan diklat keprotokolan.
  - b. Menyusun revisi pergub mengenai pelayanan tamu dan pimpinan sesuai dengan standar operasional dan prosedur serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **C. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Pada rancangan awal RKPD, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam perencanaan program dan kegiatannya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Pada Rancangan Awal RKPD dan dibandingkan dengan analisis kebutuhan Tahun 2021, terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Pelayanan Pimpinan, termasuk dalam rancangan awal RKPD, namun setelah dilakukan analisis kebutuhan akan menimbulkan infisiensi terhadap penggunaan anggaran dikarenakan kelompok sasarannya sangat kecil (Protokoler Badan Penghubung) yang hanya berjumlah 3 orang. Sehingga untuk mengakomodir kebutuhan terhadap bimbingan teknis pelayanan pimpinan (diklat keprotokolan) dilaksanakan melalui koordinasi dan partisipasi dengan OPD terkait/Kementrian terkait yang menyelenggarakan diklat tersebut.
2. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional juga termasuk dalam rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan jumlah dan intensitas tamu (pimpinan/pejabat) yang dilayani semakin meningkat. Pada tahun 2019 telah dialokasikan dana untuk 1 (satu) kendaraan dinas operasional berupa Innova sebagai salah satu solusi dalam mengatasi jumlah kendaraan dinas untuk pelayanan tamu/pimpinan daerah.

Disamping hal tersebut diatas, masih terdapat beberapa perencanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung yang tidak dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pelayanan dan keprotokolan, keterbatasan jumlah tenaga pengemudi menjadi masalah utama, dikarenakan jumlah pengemudi tidak seimbang dengan jumlah kendaraan dan intensitas tamu yang dilayani. Hal ini telah kami tindak lanjuti dengan mengusulkan anggaran untuk tenaga outsourcing/alih daya untuk

tenaga pengemudi pada Tahun 2012 dan 2013, namun belum dapat direalisasikan dikarenakan Pergub yang mengatur tenaga outsourcing sopir belum ada. Selanjutnya, pada Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 ini dianggarkan kembali untuk pengadaan Jasa tenaga sopir sehingga dapat memenuhi kuantitas sopir yang ada dalam pelayanan tamu dan pimpinan daerah.

2. Berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, khususnya bagi perantau minang yang terlantar di Jakarta, Badan Penghubung merupakan sarana/destinasi untuk mengutarakan/minta bantuan terhadap keluhan/masalah yang sedang mereka hadapi, namun pada Badan Penghubung tidak mengganggu kegiatan yang bersifat bantuan, sehingga selama ini kami hanya berinisiatif membantu secara pribadi/kelompok.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat perbedaan jumlah anggaran yang direncanakan dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Pada dasarnya hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja Badan Penghubung, dikarenakan dari hasil evaluasi program dan kegiatan, pada realisasi keuangan mencapai 90,52% penyerapan dananya. Artinya, Badan Penghubung dapat merealisasikan seluruh program dan kegiatannya (fisik : 100%) dan dapat melakukan efisiensi dalam penganggaran.

#### **D. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut, Badan Penghubung harus melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan semua stake holders yang ada di Jakarta dan sekitarnya termasuk para perantau minang (masyarakat). Selama pelaksanaan berbagai kegiatan, Badan Penghubung secara *continue* menjalin hubungan silaturahmi/emosional dengan perantau minang yang ada di Jakarta bahkan se-Indonesia, namun berkaitan dengan usulan/masukan yang sering dikemukakan oleh para perantau minang dalam sosialisasi, rapat, kegiatan sosial lainnya, Badan Penghubung bertugas memberikan arahan, koordinasi dan fasilitasi lintas vertikal dan horizontal dengan pimpinan/OPD terkait mengenai masukan, ide dan usulan dari masyarakat minang yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk tindak lanjut dari usulan tersebut akan dibahas pada Musrenbang Provinsi dan dijadikan usulan program/kegiatan pada OPD terkait/sesuai dengan tupoksinya.

Ada beberapa usulan masyarakat/perantau minang sebagai masukan dalam mengoptimalkan kinerja Badan Penghubung, antara lain :

1. Badan Penghubung hendaknya dapat memfasilitasi masyarakat minang (perantau minang) yang mengalami kesulitan secara materi dan hidup terlantar di Jakarta.
2. Mahasiswa asrama Yogyakarta, khususnya asrama mahasiswa Bundo Kandung yang dihuni oleh mahasiswi minang terlalu jauh lokasinya dengan tempat perkuliahan (kampus). Kedepannya, asrama putra dan putri hendaknya di tempatkan pada lokasi yang sama (berdekatan dengan asrama putra/Merapi Singgalang).
3. Untuk kegiatan yang sifatnya bantuan bencana alam (tanggap darurat) khususnya bagi perantau minang di Jabodetabek hendaknya dapat di akomodir dalam penganggaran Badan Penghubung.
4. Pelaksanaan kegiatan yang berbentuk promosi budaya, wisata dan investasi hendaknya di akomodir oleh Badan Penghubung, sehingga efektivitas dan efesiensi anggaran dapat lebih di optimalkan.



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**  
**TAHUN 2023**

**A. TELAAHAN TERHADAP KAJIAN DAERAH**

Menyikapi kondisi dan dinamika pemerintahan dan masyarakat baik secara regional maupun global maka diperlukan sebuah perencanaan yang berfungsi sebagai pengendali untuk kelanjutan dan perbaikan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan perannya dengan memperhatikan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang telah di tuangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan penghubung Tahun 2021-2026.

Sehubungan dengan hal diatas kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang di harapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekankan pada meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja maupun kerja sama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**Tabel 3.1**  
**Kebijakan Umum dan Program Prioritas**  
**Badan Penghubung**

<b>PERMASALAHAN 2016-2021</b>	<b>ISU STRATEGIS 2021-2026</b>	<b>TUJUAN 2021-2026</b>
Belum optimalnya fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah lainnya serta pemangku kepentingan lainnya	Pengalihan tugas pengelolaan rantau ke Badan Penghubung	1. Meningkatnya kinerja birokrasi 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Belum optimalnya Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat diluar Daerah Sumatera Barat	Intensitas frekuensi kunjungan dan kegiatan yang akan difasilitasi tidak diprediksi	

Belum dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap Penduduk Sumatera Barat di luar daerah dalam mengatasi permasalahan sosial (belum ada rumah singah dan lain lain)	Kapasitas lembaga yang terbatas dibandingkan dengan peran yang dituntut baik oleh masyarakat, lembaga daerah dan pemerintah pusat serta stakeholder lainnya	
Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Badan Penghubung	Belum adanya ketentuan/regulasi yang mengatur tentang pengelolaan rantau	

**Tabel 3.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penghubung**  
**Tahun 2021 – 2026**

<b>STRATEGI 2021-2026</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN 2021-2026</b>
Mengintensifkan koordinasi lintas sector dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, Paguyuban/Organisasi Perantau Minang serta SKPD dan memfasilitasi promosi Provinsi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran pembangunan	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat
Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat	Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan lainnya
Penataan pengelolaan rantau	Fasilitasi aktivitas/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya
	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung
	Penyusunan regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah

Dalam pencapaian prioritas pembangunan, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai SKPD yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung serta pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki arti yang strategis dalam menghubungkan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat di Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sesuai dengan prioritas RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa program sebagai upaya pencapaian sasaran dan mewujudkan visi dan misi pembangunan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pelayanan Penghubung

## **B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terpilih periode 2021 - 2026 adalah :

**"TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN"**

Dari visi tersebut di atas juga telah ditetapkan misi untuk mencapai visi tersebut sebanyak 7 misi, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomiberbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari tujuh misi Gubernur dan Wakil Gubernur diatas, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat akan mempengaruhi misi ketujuh, yaitu ***Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.***

Sedangkan untuk tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan tahunan dalam melaksanakan program/kegiatan pada tahun berikutnya (Tahun 2023).
2. Untuk menetapkan target dan capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung.
3. Sebagai salah satu sarana/wadah dalam menampung aspirasi masyarakat yang didapat dari evaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.4**  
**Indikator Program Badan Penghubung Tahun 2021 – 2026**

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2021-2026	INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2021-2026	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung	Persentase	100	100	100	100	100	100
	Persentase Promosi Daerah yang dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100

**Tabel 3.5**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026**

SASARAN 2021-2026	INDIKATOR KINERJA SASARAN 2021 - 2026	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas koordinasi dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat,	Persentase koordinasi dengan baik dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Negara, Lembaga Asing,	Persentase	100	100	100	100	100	100

Lembaga Negara, Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya serta pemangku kepentingan lainnya	Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya							
Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi potensi daerah dan penyebaran informasi daerah diluar Sumatera Barat	Promosi potensi daerah Sumatera Barat dan penyebaran informasi daerah yang dilaksanakan dengan baik	Score	A	A	A	A	A	A
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan perantau	Jumlah bidang urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi dengan perantau	Bidang Urusan	5	5	5	5	5	5
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	N/A					
Meningkatnya fasilitasi pelayanan perangkat daerah provinsi terhadap masyarakat	Jumlah fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan	Bidang Urusan	3	3	3	3	3	3

Dari uraian tujuan diatas, **sasaran** yang diharapkan dari penyusunan Renja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga target dan hasil yang telah ditetapkan dapat dicapai seoptimal mungkin.

**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Nasional					Daerah			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG										15,728,902,000	15,738,902,000					
5	07	01					11,767,402,000						11,777,402,000					
5	07	01	1.0 1				285,000,000						285,000,000					
5	07	01	1.0 1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	2 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5	07	01	1.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	40,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	1 Dokumen	40,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	40,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	1 Dokumen	40,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	50,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	1 Dokumen	50,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5	07	01	1.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	35,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas	1 Dokumen	35,000,000	BADAN PENGHUBUNG

**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		3 Laporan	40,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		4 Laporan	30,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5.07.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						6,628,402,000						6,628,402,000		
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	6,278,402,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		50 Orang/ Bulan	6,278,402,000	BADAN PENGHUBUNG	
5.07.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11 orang 0 Dokumen	240,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		11 orang 0 Dokumen	240,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5.07.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				62 Dokumen	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		62 Dokumen	35,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5.07.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	25,000,000	BADAN PENGHUBUNG	

**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.07.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		12 Laporan	50,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						289,000,000							289,000,000	
5.07.01.3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		5 Dokumen	30,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	179,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Dokumen	179,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.3.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	50,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.3.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		2 Laporan	30,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						215,000,000							220,000,000	
5.07.01.5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				96 Paket	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		96 Paket	70,000,000	BADAN PENGHUBUNG



**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01 1.0 5 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				20 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		20 Dokumen	15,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		45 Orang	55,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 5 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				5 Orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		5 Orang	50,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				5 Orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		5 Orang	30,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>730,000,000</b>							<b>730,000,000</b>	
5 07 01 1.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Paket	30,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Paket	50,000,000	BADAN PENGHUBUNG

**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01 1.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Paket	50,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5 07 01 1.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	85,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Paket	85,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5 07 01 1.0 6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Paket	65,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5 07 01 1.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	jumlah bahan bacaan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 bulan 0 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		12 bulan 0 Dokumen	5,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5 07 01 1.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah tamu yang dilayani				150 orang	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		150 orang	35,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5 07 01 1.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		50 Laporan	350,000,000	BADAN PENGHUBUNG	

**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.07.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah tenaga IT yang dibayarkan gajinya				1 orang/bulan	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 orang/bulan	60,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.07.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						265,000,000							265,000,000	
5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 unit 0 Unit	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		3 unit 0 Unit	75,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		4 Unit	40,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		5 Unit	150,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.08.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,195,000,000							2,200,000,000	
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah surat-surat kantor yang masuk dan keluar				0 Laporan 200 buah	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Laporan 200 buah	15,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan air, listrik, telepon, internet yang dibayarkan				1 tahun	280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 tahun	285,000,000	BADAN PENGHUBUNG

**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 01 1.0 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor				1 tahun	1,900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 tahun	1,900,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,160,000,000							1,160,000,000	
5 07 01 1.0 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	280,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		18 Unit	280,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit 20 Unit	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Unit 20 Unit	70,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 45 Unit	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		0 Unit 45 Unit	60,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		12 Unit	650,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 01 1.0 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		10 Unit	100,000,000	BADAN PENGHUBUNG
5 07 02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						3,961,500,000							3,961,500,000	

**Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 07 02 1.0 1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						3,961,500,000						3,961,500,000		
5 07 02 1.0 01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	jumlah bangunan gedung kantor yang disewa jumlah karangan bunga yang dibuat jumlah mess yang disewa Jumlah rumah jabatan yang disewa				1 unit 45 buah 1 unit 1 unit	1,390,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 unit 45 buah 1 unit 1 unit	1,390,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5 07 02 1.0 02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Kooordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya Jumlah koordinasi yang dilakukan dengan lembaga swasta dan masyarakat perantau jumlah koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah pusat				20 kali 20 kali 25 kali	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		20 kali 20 kali 25 kali	400,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5 07 02 1.0 03	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	jenis sarana pendukung promosi yang disediakan jumlah promosi yang dilakukan				4 jenis 5 kali	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		4 jenis 5 kali	250,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
5 07 02 1.0 04	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	jumlah kegiatan pameran yang dilaksanakan				1 kali	421,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 kali	421,500,000	BADAN PENGHUBUNG	
5 07 02 1.0 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	jumlah aktivitas pemerintah provinsi di luar daerah yang diliput dan dipublikasikan jumlah aktivitas pimpinan dan OPD diluar daerah yang dilayani				25 kali 250 kali	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraa n pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		25 kali 250 kali	1,500,000,000	BADAN PENGHUBUNG	
<b>TOTAL</b>							<b>15,728,902,000</b>						<b>15,738,902,000</b>		

**BAB V  
PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan yang memuat usulan program/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya serta berbagai aspek yang mempengaruhi dan mempunyai keterkaitan dengan Tupoksi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kewenangan yang dimiliki oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat masih sangat terbatas sehingga dalam tataran pengambilan keputusan/kebijakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jakarta sering mengalami kendala/kesulitan.

**Tabel 5.1  
Kebijakan Umum dan Program Prioritas  
Badan Penghubung**

Urusan : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat

<b>PERMASALAHAN 2016-2021</b>	<b>ISU STRATEGIS 2021-2026</b>	<b>TUJUAN 2021-2026</b>
Belum optimalnya fasilitasi hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah lainnya serta pemangku kepentingan lainnya	Optimalisasi peran Badan Penghubung dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya	Meningkatnya peran Badan Penghubung dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Asing dan Pemerintah Provinsi lainnya, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya
Belum optimalnya Promosi Potensi Daerah Sumatera Barat diluar Daerah Sumatera Barat	Fasilitasi promosi potensi Daerah Sumatera Barat seperti Pariwisata, Pertanian, Perternakan dan lain-lain	
Belum dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap Penduduk Sumatera Barat di luar daerah dalam mengatasi permasalahan sosial (belum ada rumah singah dan lain lain)	Pembinaan terhadap Generasi Muda Rantau dan Pelayanan rumah singah bagi Penduduk Sumatera Barat yang mendapat masalah sosial di luar daerah	

**Tabel 5.2**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penghubung**  
**Tahun 2021 sampai 2026**

<b>SASARAN 2021-2026</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN 2021-2026</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Meningkatnya peran Badan Penghubung dalam memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Asingdan Pemerintah Provinsi lainnya, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya	Persentase Hubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lain							
Meningkatkan fasilitasi promosi dan penyebaran informasi Daerah diluar Sumatera Barat untuk peningkatan pembangunan Daerah.	Jumlah aktifitas promosi potensi Daerah Sumatera Barat yang difasilitasi	Kali	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan koordinasi Daerah dengan Perantau dan pembinaan generasi muda rantau Sumatera Barat.	Kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan	Kali	5	6	7	8	9	10

**Tabel 5.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penghubung**  
**Tahun 2021 sampai 2026**

<b>STRATEGI 2021-2026</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN 2021-2026</b>
Mengintensifkan koordinasi lintas sector dengan Kementerian/Lembaga/Instansi, Paguyuban/Organisasi Perantau Minang serta SKPD dan memfasilitasi promosi Provinsi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung



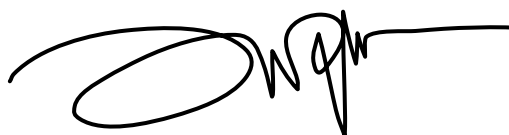
**Tabel 5.4**  
**Indikator Program Badan Penghubung**  
**Tahun 2021 sampai 2026**

<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 2021-2026</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2021-2026</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL 2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Program Pelayanan Penghubung	Persentase fasilitasi Pelayanan yang dilaksanakan Badan Penghubung	Persentase	100	100	100	100	100	100
	Persentase Promosi Daerah yang dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai fokus dan sasaran yang cukup kompleks, kedepannya Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat berharap dapat dijadikan ***First Destination*** dalam menyajikan informasi, promosi, dan nilai jual bagi Sumatera Barat pada tingkat nasional dan internasional di Jakarta. Namun, terlepas dari tujuan dan cita-cita dalam mengharumkan nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tidak henti-hentinya untuk terus melakukan perbaikan/pengembangan secara internal organisasi dan eksternal menuju organisasi yang profesional, mempunyai akuntabilitas dan transparansi serta bebas dari KKN.

Adapun harapan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan cita-citanya tersebut tidak lepas dari dukungan stakeholders (eksekutif, legislatif dan masyarakat), seperti kata pepatah "Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang".

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA  
BARAT**



**ANDRE SETIAWAN, S.STP, MPA**

Pembina, Nip. 19810920 199912 1 001